

Judul : Banjir jabodetabek memalukan,DPR kecam tiga gubernur
Tanggal : Kamis, 27 Februari 2020
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 1 dan 7

Banjir Jabodetabek Memalukan

DPR Kecam Tiga Gubernur

JAKARTA- Para wakil rakyat di Senayan, Jakarta mendadak 'marah' dan kecewa. Mereka melayangkan kecaman terhadap pejabat pemerintah daerah (pemda).

Pemicunya lantaran tiga gubernur kompak tidak hadir dalam rapat gabungan Komisi V DPR RI dengan pemerintah daerah (pemda) terkait penanganan bencana banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), Kamis (26/2).

Ketiga gubernur tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil serta Gubernur Banten Wahidin Halim. Akhirnya rapat tersebut terpaksa ditunda tanpa batas waktu yang ditentukan. » Baca Banjir...7

Banjir Jabodetabek Memalukan, DPR Kecam Tiga Gubernur

» Sambungan dari halaman 1

Informasi yang dihimpun INDOPOS, berdasarkan agenda resmi dari Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR RI, rapat tersebut diagendakan menghadirkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Namun dari pantauan, hanya Menteri PUPR Basuki yang hadir dalam rapat tersebut. Sementara tiga kepala daerah yang diagendakan hadir hanya mengutus perwakilannya. Anies diwakili Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Pemprov DKI Vera Revina Sari, Ridwan diwakili Sekda Pemprov Jabar Setiawan Wangsaatmaja, dan Wahidin diwakili Sekda Pemprov Banten Al Muktabar. Adapun kepala daerah yang menghadiri undangan rapat hanya Bupati Bogor Ade Yasin.

Lasarus, ketua Komisi V DPR RI yang pimpinan rapat menuturkan, agenda tersebut ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Penundaan rapat karena tiga kepala daerah yakni, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jabar, dan Gubernur Banten tidak dapat memenuhi undangan tersebut dan hanya diwakili jajarannya.

Lasarus mengatakan, agenda rapat ini sebenarnya ingin meluruskan perdebatan mengenai banjir yang terjadi di masyarakat.

"Kami sebetulnya mengagendakan ini karena perdebatan di ruang publik sudah terlalu ramai. Nah kenapa kita tidak ketemu saja duduk satu meja dengan Pak Menteri (Basuki Hadimuljono, Red), kita bicarakan sama-sama. Tapi teman-teman lihat sendiri hari ini (kemarin, Red) yang kami undang hanya menteri yang datang, gubernur tidak ada yang datang," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan.

Pertemuan itu akhirnya hanya mendengarkan paparan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait dengan pembangunan infrastruktur terhadap sejumlah sungai yang menyebabkan banjir di Jabodetabek. "Kalau dengan Pak Menteri PUPR kita sudah biasa rapat karena memang mitra kita. Untuk mengundang gubernur, Komisi V harus menyurati pimpinan DPR dan mendapat persetujuan dari Komisi II. Ini sudah bisa mengundang kok malah gubernur tidak ada yang datang," kata Lasarus.

Rapat tersebut juga mengundang Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dan Kepala Badan Nasional Pen-

cacian dan Pertolongan (Basarnas) Bagus Puruhito.

Ketidakhadiran ketiga gubernur itu mengundang protes dan interupsi dari Anggota Komisi V yang mengikuti rapat. Salah satu Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan Sadarestuwati.

"Jadi kalau yang berkepentingan saja tidak hadir di sini ya tidak perlu dievaluasi," tukasnya seraya menegaskan, rapat itu penting!

Diamini Anggota Komisi V DPR RI Robert Rouw. Dia menilai banjir yang terjadi di Jabodetabek sangat memalukan. Karena itu, ketidakhadiran kepala daerah menandakan mereka tidak punya hati untuk memberikan kenyamanan kepada rakyat.

Robert menyatakan, rapat ini seharusnya mengambil keputusan untuk penanganan banjir. "Saya lihat dari ketiga provinsi ini ternyata tidak butuh rapat hari ini (kemarin, Red). Kita semua hadir ini untuk memecahkan solusi, tapi mereka malah mengabaikan," tandasnya.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra Sudewo membandingkan Anies dengan Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin Jakarta. Kata dia, pada DPR Periode 2009-2014, Komisi V pernah mengundang Jokowi yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI.

"Pada Periode 2009-2014, saya berada di ruangan ini, dan ketika itu DKI Jakarta juga dilanda banjir yang sangat besar. Kemudian Komisi V mengambil langkah koordinasi seperti ini," tuturnya.

Sudewo mengatakan, Jokowi berdampingan dengan Menteri PUPR ketika itu untuk koordinasi masalah banjir.

"Komisi V juga mengundang Gubernur DKI ketika itu Joko Widodo. Dan forum itu Joko Widodo hadir memenuhi undangan Komisi V. Dengan hadirnya Joko Widodo yang bertemu langsung dengan Menteri PU," katanya.

Rapat itu, lanjut dia, menghasilkan dampak yang signifikan. Banjir sempat mereda dan tidak separah tahun sebelumnya. "Dalam forum rapat Komisi V, ada penanganan-penanganan nyata strategis dan kita lihat. Kita rasakan pasca itu pada tahun berikutnya banjir DKI agak mereda, tidak sebesar tahun sebelumnya," tandasnya.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin justru mendorong Komisi V menggelar rapat gabungan dengan Komisi II. "Dan Komisi II bidang pemerintahan mengundang supaya bisa menghadirkan ke Komisi V untuk duduk bersama. Kita sebenarnya ingin memberikan kemudahan," imbuhnya.

Azis menilai salah satu solusinya

adalah menggelar rapat gabungan. Ia memastikan pimpinan DPR akan memfasilitasi agar rapat gabungan bisa digelar. "Bisa saja dengan rapat gabungan. Bisa rapat gabungan dengan Komisi II dan komisi teknis, bisa. Dan itu memang sudah disepakati dalam Bamus (Badan Musyawarah), dan disepakati sama pimpinan fraksi. Pimpinan DPR akan melaksanakannya atas kesepakatan pimpinan fraksi yang disepakati dan disetujui dalam Bamus," papar Azis. "Pimpinan pasti akan menjamin mekanismenya tatib (tata terbit) dan UU yang ada, berlaku, akan kita jalankan," imbuh dia.

Di tempat terpisah, Gubernur DKI Anies Baswedan meminta semua pihak mengizinkan bekerja bersama warga terlebih dulu dalam mengatasi persoalan banjir. "Saya sampaikan kepada semua, izinkan saya bekerja bersama rakyat dulu sekarang ini, bersama warga," ujarnya di Jakarta, Rabu (26/2).

Sebenarnya dari malam, Anies mengaku terus berada di lapangan bersama dengan warga karena sampai dengan kemarin pagi masih banyak genangan, sehingga dirinya harus berada di lapangan terus.

"Pembahasan mengenai banjir dan lain-lain kita lakukan sesudah warga bisa kembali lagi ke rumah masing-masing, dan alhamdulillah sore ini (kemarin, Red) 100 persen sudah surut," katanya.

Menurut Anies, pada 25 Februari terdapat 294 RW yang tergenang, lalu 26 Februari jam 15.00 WIB bisa dikatakan 100 persen ada empat titik yang dalam proses surut. Kemungkinan saat ini sudah surut, karena surutnya cepat. "Sampai jam 15.00 WIB tadi ada lima lokasi proses yang surutnya cepat jadi InsyaAllah malam hari ini sudah tuntas. Tadi saya bersama jajaran berkoordinasi di lokasi yang masih ada genangan, alhamdulillah tuntas," tandasnya.

Sementara Gubernur Jabar M. Ridwan Kamil membatalkan kunjungan kerja ke dua negara, setelah Australia, demi menemui langsung korban terdampak banjir di Kabupaten Subang. "Saya sebagai gubernur memutuskan akan pulang (ke Indonesia, Red). (Kunjungan, Red.) dua negara saya batalkan, ada enam sampai tujuh agenda dibatalkan," kata Kang Emil, sapaan akrabnya, saat melakukan video konferensi dari Australia dengan Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmaja di Jabar Command Center Kota Bandung, Rabu, (26/2) pukul 17.00 WIB atau 21.00 waktu setempat.

Ia menyatakan kesadaran kepemimpinannya di Jabar untuk hadir di lapangan. "Saya paham secara psikologis kehadiran pemimpin dibutuhkan. Saya sangat berempati, sehingga membatalkan kunjungan ke dua negara yang sudah direncanakan sejak tahun lalu," tandasnya.

Dirinya akan terbang dari Australia, Kamis (27/2), pukul 01.00 waktu setempat. Setelah pesawat transit di Singapura, Kang Emil dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung pada pukul 09.00 WIB. "Nanti gubernur langsung ke Subang," tandasnya.

Audit Tata Ruang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengaudit tata ruang dari hulu hingga hilir sehubungan sejumlah titik di Jakarta dan daerah sekitar, termasuk jalan protokol dan Istana Kepresidenan, terendam banjir.

Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang menjelaskan, tahun ini pihaknya sedang kejar-kejaran dengan waktu untuk mengaudit dari hulu sampai ke hilir, mengingat banjir tersebut terjadi akibat kepadatan pembangunan Jakarta dan kurang taatnya masyarakat dalam pemanfaatan tata ruang.

"Menurut informasi, dari hulu juga ada persoalan karena di puncak sudah jadi vila," kata Budi Situmorang seperti dikutip siaran pers Biro Humas kementerian tersebut di Jakarta, Rabu (26/2).

Dia mengatakan, dari dulu pihaknya mau melakukan penanaman kembali bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pihaknya mensyaratkan pembangunan vila hanya 20 persen unsur tata ruangnya.

"Kalau lebih akan kita bongkar," katanya dalam acara #TanyaATRBP di Gedung Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (25/2).

Budi mengatakan, akibat kepadatan bangunan tersebut banyak resapan air jadi tertutup hingga membuat beberapa ruas titik di wilayah tertentu tergenang banjir karena terus diguyur hujan deras. Selain itu, ia mengatakan bahwa pihaknya juga bekerja sama dengan Ditjen Sumber Daya Air.

"Di daerah tengah Bogor, Depok dan sekitarnya itu kan kebanyakan danau sekarang kan terus berkurang, kita kerja sama untuk menyertifikatkan danau supaya danaunya tidak berkurang," ujarnya. (aen/ant)